

---

## SOSIALISASI PROGRAM KIE BAGI PASANGAN USIA SUBUR DI DPPKBP3A KABUPATEN SUMEDANG

Ukhtiana Salisa  
Universitas Sebelas April

---

### Article Info

#### *Article history:*

Received Jul 12, 2025

Revised Nov 15, 2025

Accepted Nov 30, 2025

---

#### *Keywords:*

*Public Policy*

*Socialization of Public Policy*

*KIE Program*

---

### ABSTRACT

Articles must include an abstract of 200 words or fewer. The abstract should not repeat the information already present in the title. The abstract should be written in English. Articles must include an abstract of 200 words or fewer. The abstract should not repeat the information already present in the title. The abstract should be written in English. Articles must include an abstract of 200 words or fewer. The abstract should not repeat the information already present in the title. The abstract should be written in English. Articles must include an abstract of 200 words or fewer. The abstract should not repeat the information already present in the title. The abstract should be written in English. Articles must include an abstract of 200 words or fewer. The abstract should not repeat the information already present in the title. The abstract should be written in English. Articles must include an abstract of 200 words or fewer. The abstract should not repeat the information already present in the title. The abstract should be written in English. (9 pt).



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

---

### *Corresponding Author:*

Ukhtiana Salisa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April Sumedang

Jl. Angkrek Situ No.19 Kelurahan Situ-Sumedang

Email: [anasalisa7711@gmail.com](mailto:anasalisa7711@gmail.com)

## 1. INTRODUCTION

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan Serangkaian kegiatan yang menyampaikan informasi atau pesan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan salah satu strategi penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana (KB), dan Kesejahteraan Keluarga. Kebijakan nasional pelaksanaan program KIE memiliki dasar hukum yang kuat, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan program sebagai bagian integral dari pembangunan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang berusia antara 15 hingga 49 tahun, yang berada pada usia reproduksi aktif. Kelompok ini menjadi prioritas karena berada pada masa subur, di mana kemungkinan memiliki anak cukup tinggi, sehingga membutuhkan edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, secara demografis, PUS memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan keluarga yang berkualitas. Berdasarkan data BPS (2023), jumlah PUS di Indonesia mencapai lebih 40 juta jiwa pasangan, yang tersebar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi dan tantangan dalam memberikan akses informasi, pelayanan KB, serta sosialisasi program kesehatan reproduksi kepada kelompok.

Di beberapa daerah, terutama pedesaan atau wilayah terpencil, akses terhadap informasi pelayanan KB masih terbatas. Selain itu, masih banyak PUS yang menghadapi hambatan berupa mitos dan stigma tentang penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini diperparah dengan rendahnya Tingkat literasi kesehatan reproduksi di kalangan PUS muda (usia 15-24 tahun). Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara eksplisit menekankan pentingnya pelayanan KB bagi PUS. Pada Pasal 49, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan informasi dan fasilitas KB untuk PUS sebagai bagian dari pembangunan keluarga yang sehat dan berkualitas. Keberhasilan program KB dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sangat bergantung pada efektivitas intervensi yang dilakukan terhadap PUS.

Di Kabupaten Sumedang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) berperan aktif dalam menyelenggarakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pelaksanaan KIE di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung, media digital, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pelayanan terpadu. Metode penyuluhan langsung yang biasanya dilakukan oleh petugas lapangan atau kader di komunitas lokal, penggunaan media digital seperti media sosial dan aplikasi daring untuk menjangkau audiens yang lebih luas, kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan, serta pelayanan terpadu yang menggabungkan edukasi dengan layanan langsung seperti pemasangan alat kontrasepsi atau pemeriksaan kesehatan reproduksi. Pelaksanaan program ini bersifat berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tertentu. Misalnya, penyuluhan langsung dapat dilakukan mingguan atau bulanan di tempat-tempat strategis seperti balai desa, sementara kampanye digital berjalan secara kontinyu. Selain itu, kegiatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat sering kali dilakukan dalam momen tertentu seperti peringatan hari besar kesehatan atau kegiatan rutin di tingkat kecamatan.

Berdasarkan latar belakang peneliti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menguraikan ke dalam fokus penelitian sebagai berikut:

1. Sosialisasi program Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
2. Faktor yang menghambat Sosialisasi program Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor hambatan Sosialisasi program Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Sosialisasi Program dapat dikatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan tujuan dari suatu program kepada masyarakat atau kelompok sasaran tertentu. Kegiatan sosialisasi program ini bertujuan agar sasaran program dapat memahami, menerima dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode seperti penyuluhan langsung, media digital, hingga pertemuan kelompok, dengan menyesuaikan karakteristik sasaran yang ingin dijangkau. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat atau sasaran program tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya program tersebut bagi mereka.

Adapun beberapa prasyarat menurut Herdiana (2018: 24) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya kedudukan dan peran sosialisator.
2. Adanya kejelasan isi/substansi dan metode sosialisasi.
3. Adanya kejelasan kelompok sasaran atau target group.
4. Adanya kejelasan hasil atau output.

Dalam pelaksanaan Sosialisasi Program KIE bagi PUS di DPPKBP3A Kabupaten Sumedang juga menghadapi dua faktor penghambat, menurut Kurniawati (2018:41), hambatan dalam Sosialisasi Program KIE bagi PUS dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal.

Dengan demikian, sosialisasi program sangat penting untuk memastikan program atau kebijakan tertentu berjalan dengan baik. Dengan melakukan sosialisasi program secara efektif dan menyeluruh, Masyarakat diharapkan lebih memahami dan mendukung program untuk mencapai tujuan program.

## **2. METHOD**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara sistematis untuk memahami makna di balik fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia. Metode kualitatif menggunakan data kualitatif seperti teks, gambar, audio, dan video untuk memahami makna yang lebih dalam dan mengungkap kompleksitas situasi. Menurut Sugiyono (2019:26) mengatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau deduktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena daripada generalisasi.”

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yang menjadi informan penelitian berjumlah 4 orang yaitu diantaranya: Kepala Bidang Advokasi, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kasubag Umum, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, Studi Lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi. Untuk mengelola hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu pada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting yang mengutip dari buku Sosialisasi Kebijakan Publik (dalam Sugiyono, 2020:134-142) yaitu *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data), *Conclusion drawing/Verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi), dan Triangulasi (gabungan).

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, sehingga dapat memiliki kredibilitas yang tinggi agar tujuan penelitian dapat tercapai.

## **3. RESULTS AND DISCUSSION**

Sosialisasi adalah salah satu bagian penting dari kelangsungan hidup suatu perusahaan atau pemerintahan, dan salah satu utama yang dilakukan oleh para pengusaha dalam upaya mereka untuk bertahan hidup, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Berhasil tidaknya dalam mencapai tujuannya bergantung pada kemampuan yang dia miliki. Menurut Herdiana (2018:6) menyatakan bahwa: “Sosialisasi kebijakan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan dibuat dan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan”.

Mengenai Sosialisasi Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang peneliti menggunakan teori dari Herdiana (2018:24) dengan dimensi -dimensi sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan kedudukan dan peran sosialisator
2. Adanya kejelasan isi atau substansi dan metode sosialisasi
3. Adanya kejelasan kelompok sasaran atau target group
4. Adanya kejelasan hasil atau output

Dalam pembahasan mengenai Faktor Penghambat Sosialisasi Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang peneliti menggunakan teori dari Kurniawati (1018:41) dengan dimensi -dimensi sebagai berikut:

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara kepada empat informan, maka didapatkan gambaran mengenai Sosialisasi Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang berdasarkan dimensi- dimensi, sebagai berikut.

### **Sosialisasi Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.**

#### **1. Adanya kejelasan kedudukan dan peran sosialisator**

Kejelasan kedudukan dan peran sosialisator merupakan hal yang sangat penting dalam proses sosialisasi. Kedudukan dan peran sosialisator harus jelas agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif. Kedudukan sosialisator harus diakui dan dihargai oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun organisasi-organisasi yang terkait. Adanya kejelasan tentang kedudukan dan peran sosialisator sangat penting selama proses sosialisasi. Mengetahui posisi dan peran mereka akan membantu mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan efektif, yang akan membantu mereka mencapai tujuan sosialisasi mereka dengan lebih baik seperti sumber daya manusia penyelenggara, dan mekanisme pelaksana standar operasional prosedur (SOP) sosialisasi.

- 1) Sumber daya manusia penyelenggara, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam ketersediaan sumber daya manusia dalam sosialisasi program KIE dinilai cukup sesuai dengan kondisi wilayah dan jumlah sasaran, meskipun masih perlu peningkatan kapasitas dan jumlah petugas.
- 2) Mekanisme pelaksana standar operasional prosedur (SOP) sosialisasi, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam pelaksana SOP dalam sosialisasi program KIE sudah cukup baik sesuai namun harus tetap menerapkan fleksibilitas sesuai karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat agar pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran dan berdampak efektif.

#### **2. Adanya kejelasan isi/substansi metode sosialisasi**

Kejelasan isi/substansi dan metode sosialisasi merupakan dua elemen penting dalam proses penyampaian informasi kepada publik. Kejelasan isi/substansi memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, terkini, dan mudah dipahami, sedangkan metode sosialisasi memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan dengan cara yang efektif dan menjangkau target *audience* yang tepat, seperti informasi mengenai program, media sosialisasi, kurun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi.

- 1) Informasi mengenai program, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, pegawai memahami program KIE sebagai bagian dari tupoksi, dan pelaksanaannya dimonitor serta dievaluasi. Penyuluh telah mendapat pelatihan awal, namun pelatihan lanjutan belum dilakukan secara rutin.
- 2) Media sosialisasi, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam media yang digunakan saat sosialisasi yaitu melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial seperti IG,FB, dan tiktok.
- 3) Kurun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang memiliki kurun waktu sebulan sekali untuk melakukan sosialisasi program KIE sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah.

#### **3. Adanya kejelasan kelompok sasaran (*Target Group*)**

Kejelasan kelompok sasaran atau *target group* mengacu pada pembahasan yang jelas tentang individu atau kelompok yang ingin dicapai oleh pesan yang disampaikan, untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh target *audience* seperti pemetaan sasaran, evaluasi terhadap kelompok sasaran.

- 1) Pemetaan sasaran, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang pemetaan sasaran KIE melibatkan identifikasi wilayah dan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus seperti pasangan usia subur, ibu hamil, balita, dan keluarga dengan masalah gizi. Program KIE dilaksanakan berdasarkan data yang valid dan kebutuhan lapangan.

- 2) Evaluasi terhadap kelompok sasaran, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang evaluasi terhadap kelompok sasaran program KIE dilakukan melalui observasi, diskusi, dan masukan dari masyarakat guna menilai pemahaman serta dampak perubahan perilaku peserta, sebagai dasar perbaikan program ke depan.

#### **4. Adanya kejelasan hasil (*output*)**

Adanya kejelasan hasil atau *group* dalam sosialisasi berarti bahwa tujuan dapat diukur dan dinilai dengan mudah. Kejelasan hasil (*output*) sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur secara tepat hasil (*output*) yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi, dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) seperti potensi yang diharapkan, evaluasi kerja pegawai.

- 1) Potensi yang diharapkan, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan pasangan usia subur, tentang pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta bahaya pernikahan dini dan stunting. Sosialisasi program ini mendorong perubahan perilaku positif menuju keluarga yang berkualitas dan sehat.
- 2) Evaluasi kerja pegawai, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang evaluasi kerja pegawai dilakukan secara terstruktur melalui penyusunan dan penilaian SKP, penggunaan sistem e-kinerja, serta evaluasi informal seperti *breafing*, rapat, dan diskusi langsung dengan pimpinan. Proses evaluasi tidak hanya menilai pencapaian secara administratif, tetapi juga menekankan pada pembinaan, umpan balik langsung, dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas.

### **Faktor Penghambat Sosialisasi Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.**

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal berasal dari berbagai aspek, seperti ketidakjelasan tujuan dan sasaran program, kurangnya koordinasi dan komunikasi tim, kurangnya keahlian dan kapasitas tim, kurangnya dukungan dan komitmen organisasi, dan kurangnya budaya sosialisasi yang efektif seperti motivasi, pengetahuan, anggaran.

- 1) Motivasi, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam motivasi kerja pegawai dengan kerjasama semua pihak diharapkan motivasi kerja pegawai dapat terus meningkat dan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat.
- 2) Pengetahuan, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang kurangnya pengetahuan pegawai terhadap program KIE menjadi hambatan dalam efektivitas koordinasi dan penyampaian informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan pembekalan agar sosialisasi program KIE dapat berjalan lebih optimal.
- 3) Anggaran, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang anggaran yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam sosialisasi program KIE, terlihat dari terbatasnya jangkauan kegiatan, keterbatasan logistik dan materi sosialisasi, keterlambatan pencairan dana, serta kurang optimalnya media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

#### **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu yang melakukan sosialisasi program di khalayak sasaran seperti lingkungan, kerjasama, struktur budaya, teknologi yang digunakan.

- 1) Lingkungan, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang lingkungan sosial menjadi faktor penghambat karena dilihat dari berbagai bentuk hambatan, seperti kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap informasi baru, pengaruh tokoh masyarakat yang tidak mendukung dan nilai budaya yang menganggap topik KIE sebagai hal tabu.
- 2) Kerjasama, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang kerjasama pegawai bukan merupakan faktor penghambat dalam sosialisasi KIE. Koordinasi antar anggota tim berjalan dengan baik, didukung oleh pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, serta semangat saling mendukung di lapangan justru memperkuat kegiatan sosialisasi program KIE.

- 3) Struktur budaya, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang budaya lokal memengaruhi efektivitas sosialisasi program KIE. Hambatan ini muncul saat nilai budaya tidak sejalan dengan materi yang disampaikan. Pendekatan yang menghargai norma setempat menjadi kunci keberhasilan program.
- 4) Teknologi yang digunakan, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang teknologi yang digunakan dalam sosialisasi KIE masih menjadi faktor penghambat, karena keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan SDM pelaksana, serta kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima informasi secara digital.

**Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Sosialisasi Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.**

**1. Upaya Internal**

Upaya internal dalam meningkatkan sosialisasi program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di DPPKBP3A Kabupaten Sumedang merujuk pada elemen-elemen yang berperan penting dalam mengoptimalkan program tersebut, Komitmen, kapasitas anggota, struktur organisasi, sarana prasarana, dan evaluasi monitoring menjadi elemen penting yang perlu dioptimalkan untuk mencapai tujuan program.

- 1) Motivasi, DPPKBP3A menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam sosialisasi KIE. Meliputi pemberian ruang inovasi dan apresiasi, pelibatan aktif dalam kegiatan, penyediaan fasilitas kerja yang mendukung, serta penguatan hubungan emosional antarpegawai.
- 2) Pengetahuan, Untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dalam sosialisasi program KIE, DPPKBP3A menerapkan pelatihan formal, pendampingan lapangan dan serta forum berbagi pengetahuan. Upaya tidak hanya memperkuat pemahaman materi, tetapi juga mendorong budaya belajar yang berkelanjutan di lingkungan kerja.
- 3) Anggaran, untuk meningkatkan ketersediaan dana, DPPKBP3A melakukan berbagai upaya strategis, antara lain menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia seperti BOKB, serta menggali dukungan eksternal melalui CSR dan pemberdayaan peran masyarakat seperti PKK.

**2. Upaya Eksternal**

Upaya eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali DPPKBP3A dan dapat mempengaruhi upaya sosialisasi program KIE bagi PUS. Faktor-faktor ini perlu diidentifikasi dan dianalisis agar upaya sosialisasi program KIE bagi PUS dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

- 1) Lingkungan, DPPKBP3A melakukan berbagai upaya adaptif untuk mengatasi hambatan lingkungan dalam sosialisasi program KIE. Pendekatan personal melalui tokoh masyarakat dan kader lokal menjadi kunci dalam membangun kepercayaan warga. Selain itu, pemanfaatan media alternatif serta strategi door to door dan integrasi dengan kegiatan masyarakat turut memperluas jangkauan informasi. Dukungan logistik dan teknis juga disiapkan agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan akses dan kondisi geografis.
- 2) Kerjasama, DPPKBP3A meningkatkan kerjasama pegawai dalam sosialisasi KIE melalui koordinasi lintas bidang, keterlibatan bersama di lapangan, komunikasi internal yang aktif, dan suasana kerja yang harmonis.
- 3) DPPKBP3A meningkatkan struktur budaya peserta KIE dengan pendekatan lokal, forum warga, dukungan teknis yang nyaman, dan materi yang relevan dengan kehidupan keluarga.

**4. CONCLUSION**

Sosialisasi program KIE bagi PUS di DPPKBP3A dilaksanakan belum cukup baik. Namun dapat dilihat dari kinerja DPPKBP3A yang sudah begitu yakin dan siap dengan program ini, dan DPPKBP3A serta jajarannya berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi KIE ini. Program KIE belum sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran PUS mengenai pentingnya program keluarga berencana. Selain itu, koordinasi antar petugas lapangan serta penyediaan media dan materi KIE juga masih perlu diperbaiki agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Diharapkan ke depan, pelaksanaan program KIE dapat ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun cakupan, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku PUS dan pencapaian tujuan program KB secara optimal.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan berdasarkan teori Herdiana (2018), terdiri dari faktor internal dan eksternal. Sosialisasi program KIE bagi PUS di DPPKBP3A masih terdapat hambatan yang dihadapi yaitu, kurangnya informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pelosok. Banyak PUS

yang belum memahami secara menyeluruh tujuan dan manfaat program KIE, termasuk pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi. Kurangnya penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial menyebabkan rendahnya kesadaran PUS terhadap layanan yang tersedia. Waktu pelaksanaan sosialisasi yang terbatas juga menjadi kendala dalam menciptakan ruang dialog dan pemahaman yang optimal. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera ditangani dengan langkah konkret, program KIE dikhawatirkan tidak akan mampu memberikan solusi efektif dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan Sosialisasi program KIE bagi PUS di DPPKBP3A antara lain sebagai berikut, memaksimalkan penggunaan teknologi seperti facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi mengenai program KIE, seperti waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta topik atau materi edukasi yang akan dibahas. Selain itu, buat dan Kelola website resmi DPPKBP3A Kabupaten Sumedang atau manfaatkan portal pemerintah daerah guna menyediakan informasi tersebut meliputi tujuan, manfaat, metode pelaksanaan, serta cara partisipasi PUS dalam program. Untuk meningkatkan efektivitas, jajak kerja sama dengan tokoh masyarakat, kader KB, penyuluh lapangan, serta organisasi kemasyarakatan agar pelaksana KIE lebih dekat dan diterima oleh masyarakat. Adakan sosialisasi program KIE di berbagai tempat strategis, seperti desa, kelurahan, posyandu, puskesmas, sekolah sehingga menjangkau lebih banyak pasangan usia subur. Sajikan topik yang menarik, edukatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

## REFERENCES

- Agustino, L (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Aisyah, S. (2017). *Teori Dan Praktik Pembelajaran Sosiakultural*. Bandung: Widya Aksara
- Bungin, B. (2014). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana
- Effendy, U. (2014). *Komunikasi Massa: Sebuah Pengantar*, Pustaka Jaya.125
- Herdiana, D. (2018). "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar." *Stiacimahi Ac. Id* 14(November):13-25.
- Imam Barizi, (2022). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Bakti
- Kurniawati, Khairani. (2018). *Sosialisasi Kepribadian*. Yogyakarta: sentra edukasi media
- Muhibbin Syah. n.d. *Sosiologi Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mufdlilah, N. (2021). *Komunikasi Efektif dalam Program keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, D. (2015). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya
- Syafii, M. (2020). *Kebijakan Publik: Pendekatan Teoritik dan Praktis*. Jakarta
- Suparyanto dan Rosad (2015.2020). "Pengertian Sosialisasi, Tujuan, Macam, Fungsi. Media, dan Contohnya."
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Analisis Data*. Bandung. Alfabeta
- Sutarbi, T. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Pranamedia Group
- Wahab, A.S. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PY Bumi Aksara
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Korupsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana